BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang Vietnam atau Perang Indochina II dikenang sebagai perang terlama sepanjang sejarah. Pecahnya perang ini tidak lepas dari pengaruh dua negara *super power* yang menganut ideologi berbeda, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai dampak dari Perang Dingin, dimana saat itu dua negara kuat berusaha untuk menyebarkan pengaruhnya kepada negara lain. Vietnam menjadi salah satu negara tujuan pesebaran paham tersebut di kawasan Asia Tenggara. Akibatnya, Vietnam terpecah menjadi dua bagian besar. Bagian utara negara ini bcerganti nama menjadi Republik Demokratik Vietnam yang dipengaruhi oleh aliran komunisme berkat doktrin Uni Soviet. Sedangkan Republik Vietnam yang mendiami wilayah selatan negara tersebut menganut pandangan liberalisme yang diilhami oleh Amerika Serikat. (Meiliana, 2016)

Amerika Serikat sebagai negara yang menjunjung ideologi liberalisme memutuskan untuk terjun langsung ke medan perang tahun 1950 demi membantu sekutunya di Vietnam, tepatnya Republik Vietnam yang terletak di kawasan selatan negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah kawasan selatan terdoktrin oleh ideologi komunis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Amerika Serikat memiliki ketakutan tersendiri terhadap eksistensi komunis di Vietnam. Pasalnya jika pemahaman tersebut telah tersebar hingga bagian selatan negata ini, Vietnam menjadi satu-satunya negara yang memiliki basis kuat komunis di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini dapat menyebabkan penyebaran paham komunis menjadi

lebih luas lagi sehingga Amerika Serikat memutuskan untuk terjun langsung demi mencegah pertumbuhan ideologi tersebut di selatan. (BBC, 2014) Dalam kurun waktu setahun, Amerika Serikat telah membantu membentuk pemerintahan anti-komunis baru di Republik Vietnam. Selain itu, negara ini mulai mendapat bantuan keuangan dan militer dalam rangka membangun pembangunan serta keamanan di bagian selatan. Hal ini bertujuan agar Republik Vietnam dapat menyaingi lawannya di kawasan utara. (History, 2018)

Total waktu yang dihabiskan Amerika Serikat untuk memperjuangkan kemenangan *proxy war* ini sekitar 25 tahun. (King, 2010) Perang saudara antara utara dan selatan berlangsung dengan sengit. Pihak Republik Demokratik Vietnam yang dibawah kendali komunis terkenal akan kekuatan militer yang unggul. Pasukan tentara kebanggaan wilayah utara, Viet Cong, saat itu telah berencana untuk melakukan gerakan geriliya untuk menyerang kawasan selatan. (BBC News, 2018) Untuk menutupi kekhawatiran akibat tangguhnya pasukan oleh pihak sekutu, Amerika Serikat berinisiatif untuk membuat inovasi dalam perang kali ini. Rencana AS adalah melakukan penyerangan menggunakan senjata kimia (*chemical weapon*). Bahan kimia yang dipilih adalah herbisida yang mengandung senyawa *tetrachlorodibenzo-p-dioxin* (TCDD). Racun ini memiliki kemampuan untuk menggugurkan dedaunan dalam sekejap. Jika diberikan dalam takaran yang berlebih, zat tersebut dapat mematikan seluruh hutan hanya dalam hitungan hari. Tidak hanya itu, salah satu kandungan senyawa yang terdapat di dalamnya juga dapat menurunkan kadar air serta tanah sehingga tidak dapat ditumbuhi oleh pepohonan kembali. Senjata tersebut dikenal dengan nama *Agent Orange*. (Idzna & et.al, 2016)

Penggunaan *agent orange* bertujuan untuk merontokkan hutan yang menjadi tempat persembunyian pasukan Viet Cong yang mencoba untuk menaklukkan wilayah selatan Vietnam. Jika basis Viet Cong di selatan dilenyapkan, harapannya adalah pasukan lawan tidak memiliki markas terdekat dengan kamp perang milik Republik Vietnam. Sehingga menyebabkan sekutu tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan perjuangannya. Namun siapa sangka perbuatan mereka sia-sia. Usaha untuk melenyapkan pangkalan komunis di hutan Vietnam tidak menjadi alasan bagi pejuang Viet Cong untuk menyerah demi memerdekakan Vietnam kembali di bawah pengaruh komunis. Satu-persatu wilayah selatan ditaklukkan oleh Republik Demokratik Vietnam di bawah komando Ho Chi Minh. Puncaknya yaitu pada tahun 1975 seluruh kawasan Republik Vietnam diambil alih setelah Presiden Duong Van Minh menyerah pada sekutu. (BBC News, 2018) Momentum ini diperingati sebagai reunifikasi bagi dua kawasan yang sempat terpisah oleh ideologi serta sebagai tanda berakhirnya perang saudara terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Perang benar-benar berakhir ditandai dengan adanya perjanjian perdamaian yang diadakan di Paris pada tahun 1973. Perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan istilah Paris Peace Accord 1973. (The Departement of State Bulletin, 1973) Dalam perjanjian tersebut, terdapat salah satu bab yang ditujukan khusus kepada Amerika Serikat. Poin tersebut berbunyi:

> **Chapter VIII**
>
> **The Relationship Between the United States and the Democratic Republic of Vietnam**
>
> **Article 21**
>
> The United States anticipates that this Agreement will usher in an era of reconciliation with the

> Democratic Republic of Vietnam as with all the peoples of Indochina. In pursuance of its traditional policy, the United States will contribute to healing the wounds of war and to postwar reconstruction of the DemocraticRepublic of Vietnam and throughout Indochina. (The Departement of State Bulletin, 1973)

Isi dari Bab VIII Paris Peace Accord 1973 menginginkan usaha dari Amerika Serikat untuk berkontribusi dalam rekonsiliasi serta menyembuhkan luka bekas perang. Namun sangat disayangkan, beberapa dasawarsa setelah Perang Vietnam berakhir, kewajiban tersebut belum ditunaikan oleh Pemerintah Amerika Serikat. (VAVA, 2018)

Meskipun Perang Vietnam telah berakhir, ternyata masih terdapat bekas yang diwariskan oleh adanya perang tersebut. Senjata herbisida yang konon digunakan oleh Amerika Serikat untuk menggugurkan pepohonan untuk menarik keluar pasukan Viet Cong yang bersembunyi di hutan Republik Vietnam, ternyata masih memberikan dampak negatif terhadap kehidupan. Sebab kandungan *dioxin* yang terdapat dalam senjata tersebut masih berada di lingkungan sekitar masyarakat, terutama bagian selatan Vietnam yang menjadi fokus penyemprotan *agent orange*. Dikarenakan herbisida disemprotkan pada lingkungan terbuka, hal ini menyebabkan semakin banyak objek yang terpapar zat tersebut di dataran Vietnam, seperti hutan, tanah dan sumber air, bahkan makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. (Burrage-Goodwin, 2017) Zat yang terkandung pada *agent orange* menyebabkan kandungan tanah dan air di Vietnam menjadi menurun, sehingga tidak dapat digunakan dalam dunia pertanian. Selain itu, zat ini juga menjadi parasit bagi manusia yang terpapar olehnya. Kandungan yang terdapat dalam senjata herbisida ini memiliki kemampuan untuk

menyebabkan mutasi pada gen manusia, sehingga dapat menyebabkan manusia mengalami cacat fisik. (Meiliana, 2016) Oleh karena itu, banyak diantara penduduk yang hidup di zaman tersebut mengalami penyakit serius setelah terpapar *agent orange*. Tidak hanya itu, senyawa ini juga bisa membahayakan calon bayi jika ibunya telah terlebih dahulu terkontaminasi oleh zat ini. Sehingga efek yang dihasilkan oleh eksistensi senjata herbisida *agent orange* masih dapat dirasakan hingga kini.

Jika diperhatikan, seharusnya perang hanyalah membahayakan pihak tertentu saja seperti tentara pejuang dan tidak melibatkan lainnya. Namun siapa sangka Perang Vietnam yang pecah pada tahun 1957 menyebabkan korban terbesarnya adalah warga sipil dan anak-anak. Bahkan korban tidak hanya datang dari orang yang hidup saat perang berlangsung saja, melainkan setelah perang berakhir hingga sekarang. (Meiliana, 2016) Kejadian tersebut kemudian melatarbelakangi berbagai kelompok masyarakat di Vietnam yang memiliki misi untuk memberikan bantuan kepada korban yang terpapar zat herbisida. Tidak hanya bantuan, tetapi kelompok masyarakat ini juga berusaha untuk melakukan advokasi demi mendapatkan hak dasar bagi korban Perang Vietnam. Hak yang dimaksud ialah seperti kompensasi dari pemerintah Amerika Serikat selaku aktor yang menyemprotkan *agent orange*. Selain itu, bantuan moril berupa edukasi, serta lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas akibat terpapar *agent orange* yang berusia produktif.

Saat ini, negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa aktor yang muncul dan menggeser posisi negara sebagai aktor tunggal. Aktor yang dimaksud adalah *Trans-National Corporation*

atau *Multi-National Corporation*, *Global Civil Society*, maupun individu. *Global Civil Society* atau Masyarakat Sipil Global adalah suatu kelompok yang berasal dari masyarakat dengan membawa nilai tertentu. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki relasi secara langsung dengan pemerintah, namun tidak sedikit golongan yang menjadi mitra bagi pemerintah. (Scholte, 1999)

Kerugian besar yang dialami korban Perang Vietnam menyebabkan beberapa kelompok berniat untuk mengusung ini menjadi isu yang penting untuk diperjuangkan. Kelompok tersebut terdiri atas *volunteer* yang berasal dari berbagai *non-govermental oragnization* yang memiliki basis di Vietnam maupun di luar negeri. Beberapa kelompok yang dimaksud adalah adalah Vietnam Association for Victims of Agent Orange (VAVA), Vietnam Red Cross Society (VNRC), The Aspen Institute, Medical and Scientific Aid for Vietnam, Laos and Cambodia (MSAVLC), dan Vietnam Agent Orange Relief & Responsibility Campaign (VAORRC). (Martin M. F., 2012) Gabungan *Non-Governmental Organization* dalam terminologi Masyarakat Sipil Global sebagai kelompok yang memiliki fokus untuk mengkaji serta mengadvokasi fenomena mengenai hak asasi manusia, turut merasakan beban yang dialami oleh korban Perang Vietnam yang terpapar herbisida. Oleh karena itu, banyak LSM di Vietnam yang aktif memberikan bantuan baik secara medis, logistik maupun finansial kepada korban herbisida *agent orange*, khususnya wilayah selatan negara tersebut. Selain keterlibatan *non-govermental organizations* yang memiliki basis di Vietnam, terdapat pula campur tangan dari beberapa institusi asing yang memiliki niat untuk membantu, sehingga hal ini mempercepat proses advokasi bagi korban Perang Vietnam. (King, 2010)

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana langkah advokasi oleh Masyarakat Sipil Global dalam menangani kasus korban Perang Vietnam yang terpapar Senjata Herbisida *Agent Orange*?

C. Kerangka Teori

Guna memahami lebih dalam mengenai peran Gerakan Masyarakat Sipil dalam mengadvokasi korban Perang Vietnam yang terpapar Senjata Herbisida *Agent Orange*, maka dari itu dibutuhkan kerangka berpikir yang terdiri atas konsep advokasi dan konsep *Transnational Advocacy Networks*. Untuk menjabarkan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis mengambil dua variabel yang terdapat dalam koonsep TANs, yaitu *transnational network* serta strategi advokasi dalam *transnational advocacy networks*.

1. Konsep Advokasi

Advokasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan tersebut. (Azizah, 2014) Menurut Nur Azizah dalam buku Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, kata advokasi berasal dari bahasa Inggris, to advocate, yang berarti ‘membela’ (pembelaan kasus di pengadilan – to defend), ‘memajukan’ atau ‘mengemukakan’ (to promote), berusaha menciptakan yang baru – yang belum pernah ada (to create), atau dapat pula berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (to change). Jadi tujuan utama advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik. (Azizah, 2014)

2. Konsep Transnational Advocacy Networks (TANs)

Terminologi *Transnational Advocacy Networks* dimaknai kemampuan aktor internasional non-tradisional untuk memobilisasi informasi secara strategis untuk membantu menciptakan isu dan kategori baru. (Keck & Sikkink, 1998) Kata "transnasional" menyiratkan bahwa jaringan advokasi yang dilakukan kelompok tersebut dapat mempengaruhi politik domestik maupun internasional. Dalam arti itu, beberapa tujuan utama dari jaringan advokasi mempromosikan penerapan standar melalui tekanan yang mereka buat pada aktor utama, dan pemantauan, yang memverifikasi kepatuhan dengan standar internasional. (Silva, 2017) Dikarenakan berfokus pada advokasi publik, TANs memusatkan kegiatannya pada dukungan mobilisasi untuk membujuk serta menekan pemerintah atas sebuah nilai melalui kampanye yang menargetkan akan suatu kebijakan baru demi menimpali isu yang sedang diperjuangkan. (Montebugnoli, 2014)

Istilah ini mulai santer digunakan pada tahun 1990-an, pada saat Perang Dingin berakhir. Dalam buku *Activist Beyond Borders*, Keck dan Sikkink berpendapat bahwa *Transnational Advocacy Network* mencakup aktor-aktor yang bekerja secara internasional tentang suatu masalah, yang terikat bersama oleh nilai-nilai bersama, sebuah wacana umum, dan pertukaran informasi dan layanan yang padat. (Keck & Sikkink, 1998) Berkembangnya jaringan advokasi transnasional dalam beberapa dekade terakhir merupakan bukti bahwa TANs mampu lahir menjadi salah satu aktor dalam dunia internasional di kemudian hari. Hal ini berdampak pada besarnya minat intelektual Hubungan Internasional dalam mempelajari lebih jauh terkait peran yang dimainkan TANs dalam politik internasional. (Bocşe)

Keck dan Sikkink telah menggunakan literatur Sosiologi yang mencakup gerakan sosial dalam politik global untuk membahas jaringan advokasi transnasional. Mereka beroperasi untuk meningkatkan hak partisipasi LSM dalam organisasi antar pemerintah. Perbedaan dalam keanggotaan dan fungsi dari dua jenis jaringan dapat secara jelas ditentukan secara analitis, tetapi jaringan dunia nyata mungkin memiliki beberapa fitur dari masing-masing tipe ideal. Namun, jika perbedaan antara mereka tidak dipahami dan dihormati oleh mereka yang berpartisipasi dalam suatu jaringan, bisa ada konflik politik besar yang mengancam legitimasi jaringan. (Willets, 2013)

a. Istilah *transnational networks*

Keck dan Sikkink berpendapat bahwa tujuan utama membangun relasi antara NGO satu dengan yang lainnya ialah untuk berbagi mengenai gagasan dan norma masing-masing mengenai satu isu yang dibahas bersama. (Keck & Sikkink, 1998) Alasan lainnya dikarenakan NGO lokal membutuhkan bantuan dari NGO internasional demi menyelesaikan masalah domestiknya. Hal ini dikarenkan aktor lokal percaya bahwa dengan melakukan kolaborasi dengan aktor internasional akan mempercepat target keberhasilan sebuah proses advokasi. (Kiel, How Transnational Advocacy Networks Mobilize: Applying the Literature on Interest Groups to International Action, 2011)

Dalam pelaksanaannya, aktor yang dapat membangun relasi lintas negara untuk mengadvokasi isu tertentu tidak hanya berlaku bagi NGO domestik dan internasional saja. Menurut Keck dan Sikkink, aktor tersebut dapat berupa:

1. NGO tingkat domestik dan internasional, peneliti, dan organisasi berbasis advokasi;
2. Gerakan sosial tingkat domestik;
3. Yayasan atau lembaga;

4. Media, baik domestik maupun internasional;
5. Gereja, serikat buruh, organisasi konsumen, dan intelektual;
6. Bagian dari organisasi antar pemerintah regional dan internasional;
7. Bagian dari eksklusif dan/atau cabang pemerintah parlemen.

b. Strategi advokasi dalam *transnational advocacy networks*

Demi tercapainya hasil advokasi yang memuaskan, Keck dan Sikkink memperkenalkan strategi advokasi tertentu yang berisi empat komponen yang dapat diaplikasikan selama proses advokasi. (Keck & Sikkink, 1998) Tipologi tersebut diantaranya:

1. *Information Politics*

*Information Politic*s adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan dapat dipercaya (kredibel). Pertukaran informasi dapat terjadi melalui media cetak maupun media online. Informasi ini merupakan modal yang besar bagi suatu kelompok untuk melakukan advokasi. Hal ini terjadi karena informasi adalah kebutuhan dasar dalam proses pelaksanaan advokasi. Tanpa adanya informasi, masyarakat tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai topik yang sedang diperjuangkan oleh advokator.

Setelah mendapatkan informasi, pelaku advokasi dapat memulai misinya dengan menyebarkan informasi yang didapat kepada masyarakat dan perlahan memulai proses persuasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta menyamakan frekuensi antara pelaku dan masyarakat luas mengenai isu yang ingin diadvokasi. Langkah ini dilakukan demi terciptanya kondisi yang kondusif untu melakukan advokasi.

2. *Symbolic Politics*

Symbolic Poltics adalah kemampuan untuk dapat menarik perhatian masyarakat dengan menggunakan simbol, aksi maupun cerita yang menggambarkan isu yang sedang diadvokasi. Dengan adanya simbol tertentu, masyarakat akan cepat terpengaruh walaupun terhalang dengan jarak yang jauh sekalipun.

3. *Leverage Politics*

Leverage Politics adalah kemampuan untuk mengajak aktor yang memiliki pengaruh kuat untuk bergabung ke dalam aliansi. Hal ini dilakukan untuk menutupi kelemahan diakibatkan aktor yang kurang memiliki pengaruh besar dalam suatu aliansi. Untuk dapat mengubah suatu kebijakan, pelaku advokasi perlu merangkul aktor yang memiliki pengaruh kuat agar tercapainya target keberhasilan yang diinginkan.

4. *Accountability Politics*

Accountability Politics adalah kemampuan untuk membantu aktor yang memiliki pengaruh besar untuk bertindak sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanannya, pelaku advokasi mencoba untuk mempengaruhi aktor penting dalam sebuah negara agar dapat mengubah suatu kebijakan untuk menyesuaikan keinginan advokator.

Kaitan konsep *transnational advocacy network* dengan penelitian ini adalah Masyarakat Sipil Global yang terdiri atas gabungan beberapa NGOs serta organisasi lainnya di Vietnam maupun asing berusaha untuk mengadvokasi korban Perang Vietnam demi memperjuangkan nilai bagi korban tersebut. Proses advokasi akan memiliki dua fokus yang berbeda, dimana fokus pertama adalah mengutamakan kesejahteraan bagi korban Perang Vietnam. Dalam hal

ini, Masyarakat Sipil Global mengupayakan kegiatan yang bertujuan untuk dapat meringankan proses pengobatan, rehabilitasi serta penyadaran terhadap publik akan isu ini. Di sisi lain, advokator juga melancarkan misinya untuk menekan Pemerintah Amerika Serikat sebagai target utama kegiatan advokasi untuk menunaikan kewajibannya kepada korban.

Untuk merealisasikan dua hal tersebut, Maysrakat Sipil Global mengimplementasikan nilai tipologi advokasi agar tindakan yang diambil lebih terstruktur. Tipologi yang diimplementasikan hanya tiga dari seluruh langkah yang ada. Hal ini disebabkan Masyarakat Sipil Global telah mencapai usaha dan hasil maksimal dengan melaksanakan tiga dari empat intisari yang terdapat dalam tipologi. Tipologi yang dimaksud terdiri atas *information politics*, *symbolic politics* dan *leverage politics*. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat sipil yang dilakukan di Vietnam memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai yang ditawarkan *transnational advocacy networks*.

D. Hipotesis

Langkah advokasi oleh Masyarakat Sipil Global kepada korban Perang Vietnam dilakukan dengan cara berikut:

1. Membentuk aliansi antara aktor lokal (*Vietnam Association for Victims of Agent Orange* (VAVA), *Vietnam Red Cross Society* (VNRC)) dan aktor lokal (*The Aspen Institute, Medical and Scientific Aid for Vietnam, Laos and Cambodia* (MSAVLC), dan *Vietnam Agent Orange Relief & Responsibility Campaign* (VAORRC)).
2. Pengimplementasian strategi advokasi transnasional oleh Masyarakat Sipil Global (*information politics, symbolic politics* dan

leverage politics) sebagai taktik utama pelaksanaan advokasi bagi korban Perang Vietnam.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui urgensi Masyarakat Sipil Global dalam mengadvokasi korban Perang Vietnam yang terpapar senjata herbisida *agent orange.*
2. Menjelaskan langkah advokasi yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil Global terhadap isu korban Perang Vietnam yang terpapar senjata herbisida *agent orange*.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini meliputi sebab serta proses kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil Global terhadap isu korban Perang Vietnam yang terpapar senjata herbisida *agent orange* yang dilaksanakan dari tahun 2004 hingga 2018. Isu ini akan dianalisis menggunakan pendekatan konsep advokasi dan konsep *transnational advocacy networks* agar tercapainya tujuan yang diinginkan oleh Masyarakat Sipil Global.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian terdiri atas dua pembahasan, yaitu mengenai metode pengumpulan data dan metode Analisa data yang akan diterangkan pada penjelasan berikut.

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode bersifat sekunder. Dengan kata lain, penulis menerapkan studi literatur atau *library research* baik berupa data tertulis maupun *digital* sebagai referensi untuk menjelaskan langkah advokasi yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil Global terhadap isu korban

Perang Vietnam yang terpapar senjata herbisida *agent orange*.

2. Metode Analisa Data

Penelitian ini menerapkan metode Analisa data yang bersifat kualitatif, dimana data yang diperoleh ialah dalam bentuk eksplanasi. Metode ini membantu penulis dalam mengembangkan referensi data dan menghubungkan teori dengan analisis data yang akurat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan diurakan dalam lima bab. Pada **BAB I** merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan. Kemudian terdapat **BAB II** yang akan menjelaskan mengenai sejarah Vietnam yang akan dibahas melalui dua peperangan yang dialami, yaitu Perang Indochina I dan Perang Indochina II (Perang Vietnam). Selain itu, Bab II akan membahas dampak penggunaan senjata herbisida agent orange pada saat Perang Indochina II berlangsung, serta efek yang ditimbulkan akibat eksistensi senjata ini dalam beberapa tahun kedepan, terutama bagi masyarakat sipil yang terkena imbas dari zat tersebut.

Selanjutnya pada **BAB III** memaparkan mengenai profil masing-masing aktor serta usaha beberapa kelompok masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Global serta menjelaskan pengimplementasian transnational network dalam pengadvokasian korban Perang Vietnam. Pada **BAB IV**, penelitian ini akan menjelaskan mengenai usaha yang dituangkan dalam setiap program yang diadakan oleh Masyarakt Sipil Global selama proses advokasi berlangsung. Serta penjelasan mengenai

pengimplementasian tipologi advokasi transnasional dalam proses pengadvokasian korban Perang Vietnam. Kemudian pada bab terakhir, yaitu **BAB V** mengandung ulasan mengenai penjelasan yang telah dipaparkan dalam beberapa bab sebelumnya.